

# **PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DI KOTA METROPOLITAN DAN KOTA NON METROPOLITAN**

## ***COMMUNITY PARTICIPATION IN SOCIAL SECURITY MEMBERSHIP IN METROPOLITAN CITIES AND NON-METROPOLITAN CITIES***

**Yanti Astrelina Purba**

Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Depok, Indonesia, 16424

Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Indonesia, 12710

**E-mail:** [yantipurba1995@gmail.com](mailto:yantipurba1995@gmail.com)

**Ruth Meilianna**

Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Indonesia, 12710

**E-mail:** [ruthmeilianna56@gmail.com](mailto:ruthmeilianna56@gmail.com)

### **Abstrak**

Jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saat pekerja mengalami risiko-risiko kerja sehingga menciptakan ketenangan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jenis kota berasosiasi dengan partisipasi pekerja pada jaminan sosial ketenagakerjaan, serta mengetahui apakah faktor status kontrak kerja mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan regresi logistik biner. Data analisis yang digunakan adalah data Sakernas Agustus 2021 dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dengan pengolahan menggunakan aplikasi Stata 15.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki status pekerjaan yang tetap, jangka panjang maka semakin besar peluang kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini terlihat berdasarkan hasil inferensial bahwa pekerja yang memiliki perjanjian lisan berpeluang sebesar 0,610 kali, berstatus PKWT sebesar 6,717 kali dan berstatus PKWTT sebesar 22,888 kali berpartisipasi pada jaminan sosial dibandingkan pekerja yang tidak memiliki status kontrak kerja. Temuan lainnya bahwa variabel jenis kota menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya itu saja, kota metropolitan lebih banyak berpartisipasi pada jaminan sosial jika dibandingkan dengan kota non-metropolitan. Selain faktor status kontrak kerja dan jenis kota, terdapat variabel demografi seperti jenis kelamin, status perkawinan, umur, umur kuadrat, Tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, status pekerjaan yang secara signifikan berpengaruh pada partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan penelitian terlihat bahwa variabel jenis kelamin, status perkawinan, umur, umur kuadrat, tingkat pendidikan terakhir dan status pekerjaan berpengaruh positif sedangkan Variabel ukuran rumah tangga berpengaruh negatif signifikan memengaruhi partisipasi pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** jaminan sosial, metropolitan, kontrak kerja

### ***Abstract***

*Social security is imperative for protecting workers facing occupational hazards to create ease of mind at work. This study aims to determine whether metropolitan status has any association with employment social security participation, and to determine whether the employment contract status affects employment social security participation, and. The data used is the August 2021 Sakernas data which was analyzed using descriptive and inferential analysis while being processed with Stata 15.1. The result of the study showed that workers who have permanent, long-term employment status have a*

*greater chance of participating in employment social security. This can be seen from the inferential results that workers who had verbal agreements are 0.610 times, those with PKWT status are 6.717 times, and those with PKWTT status are 22.888 times more likely to participate in social security compared to workers who do not possess employment contract. Another finding is that the metropolitan status showed a positive and significant relationship to employment social security participation. Moreover, metropolitan cities participated more in social security as compared to non-metropolitan cities. In addition to employment contract status and metropolitan status, there are demographic variables such as gender, marital status, age, age squared, education level, household size, employment status which significantly influenced employment social security participation. The result showed that gender, marital status, age, age squared, last education level and employment status had a positive effect while household size had a significant negative effect on employment social security participation.*

**Keywords:** social security, metropolitan, employment contract

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan di masa depan menjadi krusial untuk dipersiapkan sejak dini untuk menghindari resiko-resiko ketidakpastian sehingga diperlukan sebuah perlindungan khususnya perlindungan ketika bekerja. Oleh sebab itu, negara hadir untuk memberi perlindungan melalui jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dinaungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selaku badan hukum publik yang diberi mandat untuk mengelola dan bertujuan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menanggulangi resiko sosial maupun ekonomi (Sanitya, 2019).

Memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat dan memberikan rasa nyaman dalam bekerja merupakan tujuan dari program pemerintah (Sanitya, 2019). Dalam ketenagakerjaan, perlindungan dalam bekerja yang dimaksud yakni jaminan sosial ketenagakerjaan. Keberadaan sistem jaminan sosial sangatlah penting disebabkan meningkatnya resiko ketidakpastian sosial ekonomi terutama pada masyarakat miskin yang dapat mengganggu ketahanan keluarga yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (Purnama, 2015).

Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial dan menyatakan peran negara sangat penting dalam memberikan perlindungan sosial universal dan tidak menysar pada sektor dan wilayah tertentu saja, seperti hanya menysar atau berfokus pada sektor formal namun pada sektor informal. Berdasarkan data BPS bahwa pada Agustus 2021 terdapat 59,45 persen pekerja sektor informal dan sebesar 40,55 persen sektor formal. Sektor informal memegang peranan penting pada ketenagakerjaan Indonesia. Sektor informal atau yang dikenal dengan “*shadow economy*” ini masih mendominasi pada struktur ketenagakerjaan (Noeraini, 2015).

Perlindungan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saat tenaga kerja tersebut mengalami risiko-risiko kerja sehingga ketika bekerja akan menimbulkan rasa ketenangan yang ujungnya akan berdampak pada produktivitas kerja yang tinggi (Adillah & Anik, 2015; Soewartoyo & Triyono, 2013). Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) (2001) mengemukakan bahwa lebih dari setengah populasi di dunia tidak memiliki perlindungan sosial. Hal yang paling ekstrem lainnya yakni di sebagian besar negara sub-Sahara dan Asia Selatan, cakupan

perlindungan jaminan sosial kurang dari 10 persen. Hal ini disebabkan bahwa lebih dari 90 persen tenaga kerja di negara-negara tersebut bekerja secara di sektor informal (Chen, 2008).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 bahwa tenaga kerja di Indonesia sebanyak 90,9 juta (potensi yang memenuhi syarat sesuai data BPS), namun hanya 59,90 persen yang terdaftar menjadi peserta BPJS (baik sektor formal maupun informal). Selanjutnya, hanya 2,86 juta yang menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (Sektor Informal). Angka ini sangat timpang dengan angka kepesertaan penerima upah (sektor formal) yang sudah mencapai 40,42 juta. Hal ini terlihat bahwa sektor informal masih banyak yang belum terjangkau oleh jaminan sosial tenaga kerja. Padahal Walaupun sektor informal memiliki banyak resiko dalam bekerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lund (2012) bahwa sektor informal menghadapi resiko-resiko pekerjaan yang tinggi dan tempat kerjanya tidak diatur oleh peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sektor informal memiliki resiko 10 kali lebih tinggi mengalami cedera atau kecelakaan kerja jika dibandingkan dengan sektor formal (Kongtip et al, 2015). Walaupun demikian, sektor informal ini masih menjadi tumpuan bagi masyarakat yang belum tersentuh di sektor formal.

ILO menyatakan jaminan sosial merupakan sebuah perlindungan atas masalah-masalah baik dari aspek ekonomi yang penyebabnya yakni adanya kehilangan atau berkurangnya pendapatan secara substansial yang berkaitan dengan pekerjaan bahkan kematian.

Oleh karena itu, diperlukan kehadiran negara dan Indonesia berkomitmen dengan

meratifikasi konvensi ILO No. 102/1952 yakni memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan adanya pengembangan diri dan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan tentang Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 artikel 2 bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial (Sayekti & Sudarwati, 2010).

Dalam mempercepat terselenggaranya sistem jaminan untuk secara universal maka terdapat kebijakan yang terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 yakni membentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia yakni BPJS Kesehatan yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab pada jaminan sosial bagi para pekerja (Zulfa & Dwimawanti, 2018). BPJS Kesehatan mulai mendistribusikan program asuransi kesehatan pada 1 Januari 2014, sedangkan per tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan memulai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari perlindungan atas risiko usia tua, disabilitas, kematian dan kecelakaan kerja (World bank, 2020).

BPJS Ketenagakerjaan mengelola lima program dan terdapat program terbaru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diluncurkan tahun 2021. Adapun kelima program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

1. Jaminan Kecelakaan kerja, yakni perlindungan pada peserta jika terjadi kecelakaan saat bekerja (termasuk kecelakaan yang terjadi selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau

- sebaliknya) atau menghidap penyakit akibat kerja.
2. Jaminan Kematian, yakni perlindungan yang diberikan ketika pekerja meninggal dunia. Namun tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
  3. Jaminan Hari Tua, yakni program perlindungan yang menjamin peserta apabila pekerja mengalami masa pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Menurut peraturan yang baru yakni menurut Permenaker 2 tahun 2022 bahwa program ini dapat dicairkan apabila pekerja tersebut meninggalkan Indonesia selamanya, usia 56 tahun, cacat total tetap dan meninggal dunia.
  4. Jaminan Pensiun, yakni perlindungan dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta atau ahli warisnya dengan ketentuan jikalau Peserta tersebut memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
  5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yakni perlindungan bagi pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun manfaat yang diterima berupa uang tunai, Pelatihan kerja (Pelatihan berbasis kompetensi dan dilakukan melalui LPK pemerintah, swasta dan perusahaan ) dan Akses informasi pasar kerja

Jika dilihat dari sisi pekerja informal, dalam hal ini dikenal dengan istilah Bukan Penerima Upah (BPU) diberi tawaran hanya 3 (tiga) jenis program jaminan sosial dari 5 (lima) program yang ditawarkan. Namun peserta BPU dapat mengikuti program sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan para peserta. Adapun program yang penting dan wajib adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat sukarela.

Adapun jaminan yang paling mendasar dan dibutuhkan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Sanitya, 2019). Peserta BPU sendiri mendaftarkan diri pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada wadah/kelompok tertentu atau dapat juga mendaftarkan dirinya sendiri dengan mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Pembayaran bagi kelompok ini berbeda dengan pekerja formal dimana sifatnya harus membayar secara (Badikenita, 2017).

Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memperluas cakupan jaminan sosial. Namun, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi sosial demografi maupun ekonomi. Beberapa penelitian yang melihat Status kontrak kerja dan jenis kota mempengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan, namun studi terkait hal ini belum banyak diteliti di Indonesia. Terdapat studi terkait jenis kota yakni penelitian yang dilakukan oleh Lee et al., (2010) bahwa pekerja berstatus berusaha sendiri lebih tinggi permintaannya dibandingkan pegawai yang bergaji. Penduduk kota-kota kecil dan area pedesaan lebih banyak membeli asuransi dibandingkan penduduk kota metropolitan disebabkan Penduduk kota-kota kecil dan area pedesaan tidak mendapatkan manfaat perlindungan dari pemberi kerja dan didukung oleh hubungan kekerabatan yang memudahkan marketing untuk mengajak berpartisipasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Baloul dan Dahlui (2014) mengemukakan bahwa di akses layanan jaminan sosial di perkotaan lebih baik dibandingkan dipedesaan. Hal ini didukung dengan data bahwa penduduk di perkotaan 26 persen lebih tinggi mengikuti jaminan sosial jika dibandingkan dengan penduduk di

perdesaan. Tidak hanya itu saja, menurut Mudgal et al., (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan sehingga penduduk di pedesaan cenderung sulit mendapatkan jaminan akibat akses yang kurang. Hal ini berbeda dengan penelitian Kirigia et al., (2005) yakni penduduk yang tinggal di Pemukiman informal perkotaan cenderung lebih rendah kepesertaannya.

Selanjutnya, faktor status kontrak kerja atau perjanjian yang dimiliki pekerja menjadi faktor yang signifikan untuk menjadi peserta jaminan sosial. Studi yang dilakukan oleh Gao et al., (2012) mengemukakan bahwa kontrak kerja bagi pekerja migran untuk memperoleh perlindungan yakni asuransi sosial yang dapat meningkatkan keamanan dan melindungi hak-hak dasar mereka. Adapun pekerja yang memiliki kontrak jangka panjang dapat meningkatkan kemungkinan memiliki asuransi sosial yakni 4,96 kali peluang untuk asuransi kesehatan dan 10,94 kali peluang untuk pensiun, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kontrak. Selanjutnya, pekerja yang memiliki kontrak kerja lebih mungkin berpartisipasi dalam asuransi sosial daripada yang tanpa kontrak (Cheng, 2014).

Berbagai studi banyak menjelaskan jaminan sosial ketenagakerjaan penting dalam memitigasi resiko-resiko kerja dan memberi rasa kenyamanan dalam bekerja. Di Indonesia, studi terkait Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih sedikit dan lebih banyak membahas terkait jaminan sosial kesehatan (Dartanto et al, 2016; Idris et al, 2017). Terdapat studi yang bukan meneliti di Indonesia yang melihat partisipasi jaminan sosial, namun hanya melihat secara spesifik yakni hanya 1 program/skema saja yakni jaminan pensiun (Ben & Marouani, 2019;

Dummann, 2008; Adzawla, 2015). Di Indonesia, ada yang meneliti terkait partisipasi jaminan sosial dengan melihat program-program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun analisis yang digunakan hanya analisis deskriptif dengan menggunakan *cross tabulation* guna mengkalkulasi frekuensi dan persentase dua atau lebih variabel (Purba et al, 2020). Tidak hanya itu saja, studi yang membahas dengan mengaitkan faktor status kontrak kerja dan jenis kota masih sedikit yang meneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jenis kota berasosiasi dengan partisipasi pekerja pada jaminan sosial ketenagakerjaan serta apakah faktor status kontrak kerja mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, penelitian ini ini mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi jaminan sosial dan bagaimana partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif memperlihatkan gambaran umum terkait cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan menurut karakteristik sosial ekonomi dan demografi. Informasi terkait hal tersebut akan disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil olah data didukung dengan berbagai studi terdahulu. Selain itu, dilakukan Analisis Inferensial menggunakan regresi logistik biner untuk mengidentifikasi hubungan masing-masing variabel yang digunakan dan melihat besarnya rasio kecenderungan dari setiap variabel yang memengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat tahapan analisis dalam regresi logistik biner. Analisis data bertujuan untuk

mendapatkan model yang cocok atau mampu menunjukkan keterkaitan yang kuat antar variabel dalam model. Untuk itu dilakukan pengujian parameter. Ada dua pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi logistik biner dengan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha$ . a. Statistik Uji G (likelihood ratio test)

Statistik uji G digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas di dalam model secara bersama-sama dengan menetapkan hipotesis.

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

(Tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas)

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0$$

(Minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas)

Statistik uji yang digunakan adalah:

di mana,

$L_0$  = likelihood tanpa variabel bebas

$L_k$  = likelihood dengan semua variabel bebas

Statistik G ini mengikuti sebaran Khi Kuadrat dengan derajat bebas  $p$ .  $H_0$  ditolak nilai  $G$  lebih besar daripada nilai  $\chi^2$  pada level  $\alpha$  dan derajat bebas  $p$  ( $\chi^2(p); \alpha$ ) di mana  $\alpha$  adalah tingkat signifikansi. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas  $X$  secara keseluruhan mempengaruhi variabel tidak bebas  $Y$ .  $H_0$  ditolak berarti paling sedikit ada satu  $\beta_j \neq 0$ . Untuk melihat  $j$  mana yang nol (tidak signifikan), digunakan uji koefisien parameter  $\beta$  secara parsial.

#### b. Statistik Uji Wald

Untuk menguji keberartian parameter (koefisien  $\beta$ ) secara parsial digunakan uji Wald dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_j = 0$ ; (tidak ada pengaruh variabel bebas ke- $j$  terhadap variabel tidak bebas)

$H_1: \beta_j \neq 0$ ; (ada pengaruh variabel bebas ke- $j$  terhadap variabel tidak bebas)  
Dengan statistik uji

$$W_j = \left[ \frac{\beta_j}{se(\beta_j)} \right]^2$$

Dimana  $j=1, 2, \dots, p$

$W_j$  diasumsikan mengikuti sebaran Khi Kuadrat dengan derajat bebas 1.  $H_0$  akan ditolak jika  $W_j > \chi^2(p); \alpha$  atau nilai  $p$  kurang dari tingkat signifikansi. Jika  $H_0$  ditolak maka  $\beta_j$  signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas  $X$  secara parsial memang berpengaruh terhadap variabel  $Y$ .

Regresi logistik biner digunakan untuk menentukan analisis multidimensi antara variabel sosial demografi responden terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Regresi logistik digunakan untuk mendeskripsikan dan menguji hipotesis relasi antara variabel respon kategorik dengan satu atau lebih variabel prediktor kategorik atau numerik (Peng et al., 2002). Sedangkan menurut Hosmer dan Lemeshow (2000) bahwa teknik analisis regresi logistik biner merupakan teknik analisis yang tepat untuk mengetahui dampak variabel bebas pada variabel terikat di mana variabel terikat tersebut berupa variabel kategorik dengan dua kategori. Sehingga teknik ini dirasa tepat dalam penelitian ini mengingat variabel terikat penelitian ini merupakan variabel kategorik dengan dua kategori.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data Sakernas tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia dan

menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dengan estimasi populasi sampai level kabupaten/kota. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pekerja yang berusia 15-64 tahun, yakni usia yang tergolong usia produktif. Penelitian ini dibatasi hanya melihat status pekerjaan buruh/pegawai/karyawan, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non-pertanian. Hal ini mengacu pada data Sakernas yakni pertanyaan terkait kepesertaan jaminan sosial

ketenagakerjaan hanya ditanyakan pada ketiga status pekerjaan itu saja.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peserta dikatakan berpartisipasi pada BPJS Ketenagakerjaan jika pekerja memilih salah satu atau lebih dari 5 program jaminan ketenagakerjaan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian**

No	Variabel	Definisi Operasional	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Variabel Terikat</b>			
<b>Variabel Terikat</b>			
1.	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pekerja menjadi peserta Jamsostek jika memilih salah satu atau lebih dari 5 program jaminan ketenagakerjaan yakni: 1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 2. Jaminan kematian (JKM), 3. Jaminan hari tua (JHT) 4. Jaminan Pensiun (JP) 5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JHP)	1=Peserta BPJS Ketenagakerjaan 2=Bukan Peserta (referensi)
<b>Variabel Bebas Utama</b>			
2.	Jenis Kota (metro)	Klasifikasi jenis kota menjadi kota non-metropolitan (acuan) dan kota metropolitan	1= Kota non-metropolitan (referensi) 2=Kota metropolitan
3.	Status kontrak	Status Kontrak Kerja atau perjanjian kerja yakni: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (3) Perjanjian lisan dan (4) Tidak ada perjanjian	1=PKWTT 2=PKWT 3=Perjanjian lisan 4=Tidak ada (referensi)
<b>Variabel Bebas Kontrol</b>			
4	Jenis Kelamin	Jenis kelamin responden	1=Laki-laki 2=Perempuan (referensi)
5	Status Perkawinan	Status perkawinan responden	1=Kawin 2=Lainnya (referensi)
6	Umur	Umur pada ulang tahun terakhir responden	Numerik
7	Umur kuadrat	Umur dikuadratkan	Numerik
8	Pendidikan	Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diikuti oleh responden digunakan sebagai pendekatan tingkat pendidikan responden Tingkat Pendidikan yang ditamatkan yakni Rendah: <SMA/SMK Sederajat, Menengah: SMA/SMK Sederajat danTinggi: Diploma/Perguruan Tinggi 0: Rendah (referensi) 1: Menengah 2: Tinggi	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan yakni Rendah: <SMA/SMK Sederajat, Menengah: SMA/SMK Sederajat danTinggi: Diploma/Perguruan Tinggi 0: Rendah (referensi) 1: Menengah 2: Tinggi

9	Ukuran Rumah Tangga	jumlah seluruh orang yang biasa tinggal di rumah tangga, di mana pengelolaan kepengurusan makannya dari satu dapur.	Numerik
10	Status pekerjaan	Kategori Sektor formal informal menggunakan metode lama yakni status pekerjaan. Karena pada data Sakernas pertanyaan tentang kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja hanya ditanyakan pada pekerja dengan status pekerjaan buruh/pegawai/karyawan, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non-pertanian, maka pengklasifikasian pekerja pada sektor formal/informal didasarkan pada tiga status pekerjaan tersebut. Jika responden berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, maka pekerja diklasifikasikan sebagai pekerja sektor formal, sedangkan jika pekerja berstatus pekerja bebas di pertanian maupun non-pertanian, maka pekerja diklasifikasikan sebagai pekerja sektor informal.	0: informal (referensi) 1:formal

Artikel ini melihat faktor jenis kota yang dilihat dari apakah pekerja tersebut bertempat tinggal di kota metropolitan atau kota non-metropolitan. Terkait definisinya, Metropolitan merupakan suatu kawasan, wilayah, atau kesatuan dari kota-kota yang memiliki pusat (inti kota) dan memiliki kawasan sekitarnya (kawasan penyokong) yang saling terintegrasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Kawasan metropolitan yang selanjutnya disebut kota metropolitan cenderung melewati batas-batas administratif yang telah ditetapkan suatu sistem pemerintahan (DJPR, 2006; Montgomery et al., 2003).

Sementara, kota non-metropolitan merupakan kota administratif dengan ciri berpenduduk kurang dari 1.000.000 jiwa yaitu kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar (Idham, 2019; Rizal, 2020). Terdapat 73 kota non-metropolitan. Mayoritas kota-non metropolitan berada di Pulau Sumatera dan kepulauan sekitarnya sebanyak 31 kota, Pulau Jawa 17 kota, Pulau Kalimantan 8 kota, Pulau Sulawesi 8 kota, kawasan Nusa Tenggara 3 kota, kawasan Maluku 4 kota, dan 1 kota di Pulau Papua. Kota Bandar Lampung dan Kota Batam berpenduduk lebih dari 1.000.000

jiwa, selain tidak termasuk ke dalam RPJMN 2020-2024, kedua kota tersebut tidak memiliki kawasan di sekitar kota inti yang mampu mendukung kegiatan sosial-ekonomi kota inti sehingga diklasifikasikan sebagai kota non-metropolitan.

Menurut Perpres Nomor 18 Tahun 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN), pemerintah Indonesia menetapkan 10 kota metropolitan sebagai agenda pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024). Dari 10 kota metropolitan empat diantaranya merupakan Major Project yaitu kota metropolitan dengan prioritas pembangunan. Sementara enam wilayah metropolitan lainnya berada diPulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tujuan kota metropolitan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah untuk membangun pusat pertumbuhan wilayah dan perluasan kesempatan kerja dalam lima tahun mendatang. Adapun kota metropolitan di Indonesia antara lain:

1. Bimindo (Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara).
2. Jabodetabek Punjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur).

3. Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir)
4. Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo)
5. Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar)
6. Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan)
7. Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan)
8. Banjar Bakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut)
9. Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan).
10. Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi)

Kajian ini dilengkapi analisis regresi inferensial dengan metode regresi logistik biner. Studi ini menggunakan regresi logistik biner untuk menentukan analisis multidimensi antara variabel sosial demografi responden terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Model regresi logistik biner dijelaskan dalam persamaan berikut.

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \text{logit}(p)$$

$$= b_0 + b_{11}\text{metro} + b_{21}\text{kontrak}_1 + b_{21}\text{kontrak}_2 + b_{21}\text{kontrak}_3 + b_3\text{jk} + b_4\text{kawin} + b_5\text{umur} + b_6\text{umur}^2 + b_{71}\text{didik}_1 + b_{72}\text{didik}_2 + b_8\text{ruta} + b_9\text{formal} + \varepsilon$$

Dimana:

Keterangan:

$p$  = Peluang responden berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan

$1 - p$  = Peluang responden tidak berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan

$b_0$  = Log odd pada saat  $x$  sama dengan nol /intercept

$b_1, b_2, \dots, b_{123}$  = slope

metro = Jenis kota

kontrak = Status Kontrak kerja

jk = Jenis Kelamin

kawin = Status Perkawinan

umur = Umur responden

didik = Pendidikan terakhir

ruta = Ukuran Rumah tangga

formal = Status Pekerjaan

Studi ini menggunakan Uji Wald guna menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi setiap variabel bebas dalam model untuk mendeteksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dalam model dengan menggunakan statistik uji Wald pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Dalam hal ini yang dilihat yakni Sig pada masing-masing variabel atau nilai  $p$ -value  $< 0,05$  artinya berdasarkan taraf signifikansi 5 persen, maka variabel tersebut signifikan berpengaruh terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

## HASIL DAN ANALISIS DESKRIPTIF

Adapun hasil regresi logistik biner dengan menggunakan aplikasi Stata untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dijelaskan pada Tabel 2.

Hasil regresi logistik biner (Tabel 2) mengidentifikasi faktor-faktor sosial demografis dan faktor ekonomi yang memengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara umum, semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik memengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha=5\%$ ).

Dari hasil pengolahan data tersebut masing-masing variabel yang signifikan

secara statistik pada model yang telah terbentuk diterjemahkan dengan melihat nilai koefisien (B) dan nilai  $\text{Exp}(B)$  masing-masing variabel hasil output model persamaan, maka dapat dijelaskan nilai rasio kecenderungan (*odds ratio*) yang berpengaruh terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Variabel jenis kota, status kontrak kerja, jenis kelamin, status perkawinan, umur, umur kuadrat, Tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, status pekerjaan secara signifikan berpengaruh pada partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Berdasarkan nilai 0,4036 dari Pseudo  $R^2$  menjelaskan keragaman data variabel independen mampu memperlihatkan keragaman data variabel dependen sebesar 40,36 persen sedangkan 59,64 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

**Tabel 2. Hasil Olahan Regresi Logistik Biner**

Variabel (1)	Koefisien regresi (B) (2)	S.E (3)	Sig (4)	Odds ratio (5)
<b>Variabel bebas utama</b>				
<b>Jenis Kota</b>				
Kota non metropolitan (Ref)				
Kota Metropolitan	0,344	0,016	0,000	1,411
<b>Status Kontrak kerja</b>				
Tidak ada (Ref)				
PKWT	1,905	0,017	0,000	6,717
PKWTT	3,131	0,021	0,000	22,888
Perjanjian lisan	-0,494	0,025	0,000	0,610
<b>Variabel bebas Kontrol</b>				
Jenis kelamin				
Perempuan (Ref)				
Laki-laki	0,425	0,014	0,000	1,530
Status Perkawinan				
Lainnya (Ref)				
Kawin	0,259	0,018	0,000	1,295
Umur	0,051	0,004	0,000	1,053
Umur kuadrat	0,000	0,000	0,000	1,000
Pendidikan				
Rendah (Ref)				

Sedang	0,667	0,017	0,000	1,948
Tinggi	0,894	0,019	0,000	2,445
Ukuran Rumah tangga	-0,057	0,004	0,000	0,945
Status Pekerjaan				
Informal (Ref)				
Formal	2,176	0,040	0,000	8,812
<b>Observasi</b>	<b>203.563</b>			
<b>Prob &gt; chi<sup>2</sup></b>	<b>0,0000</b>			
<b>LR chi<sup>2</sup></b>	<b>105.599,81</b>			
<b>Pseudo R<sup>2</sup></b>	<b>0,4036</b>			
<b>Konstanta</b>	<b>-6,050</b>	<b>0,091</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>

Sumber: Sakernas Agustus 2021 (data diolah)

Dari hasil olah data SAKERNAS Agustus 2021 (Tabel 3) ditemukan bahwa mayoritas laki-laki baik di Kota Metropolitan dan kota non-metropolitan tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga terlihat sama dengan perempuan yakni baik di Kota Metropolitan maupun kota non-metropolitan mayoritas tidak ikut Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Jika dilihat berdasarkan status perkawinan, bahwa pekerja yang sudah kawin di Kota Metropolitan dan Kota non-metropolitan mayoritas tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jika dilihat dari Tingkat pendidikan bahwa pekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan menengah baik di Kota Metropolitan dan kota non-metropolitan mayoritas tidak ikut BPJS

Ketenagakerjaan. Hal ini berbeda dengan pekerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yakni baik di kota metropolitan maupun kota non-metropolitan mayoritas ikut jaminan sosial. Hal ini terlihat bahwa pekerja yang memiliki pendidikan tinggi di Kota Metropolitan memiliki persentase ikut BPJS Ketenagakerjaan sebesar 70,88 persen dan di kota non-metropolitan sebesar 63,81 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja yang memiliki pendidikan tinggi dan bertempat tinggal di Kota Metropolitan akan cenderung berpartisipasi lebih tinggi akan BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan pekerja yang berada di kota non-metropolitan. Berdasarkan Tabel 3. yakni bertambah tingginya level pendidikan maka semakin tinggi juga partisipasinya akan jaminan sosial ketenagakerjaan.

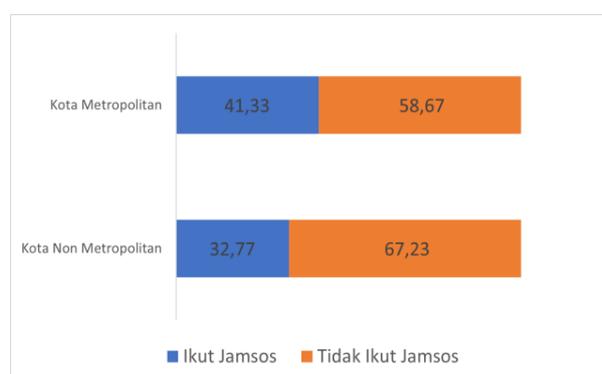
**Tabel 3. Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Metropolitan dan Non Kota Metropolitan**

Karakteristik		Kota Metropolitan				Kota Non Metropolitan			
		Ikut Jamsos		Tidak Ikut Jamsos		Ikut Jamsos		Tidak Ikut Jamsos	
		N	%	N	%	N	%	N	%
Jenis kelamin	Perempuan	5.168	41,99	7.141	58,01	20.352	35,5	36.977	64,5
	Laki-laki	9.429	40,98	13.578	59,02	34.776	31,35	76.142	68,65
Status perkawinan	Lainnya	4.171	36,66	7.207	63,34	11.452	23,58	37.122	76,42
	kawin	10.426	43,55	13.512	56,45	43.676	36,5	75.997	63,5
Status kontrak kerja	Tidak ada	1.426	12,91	9.617	87,09	4.945	8,46	53.523	91,54
	PKWT	6.966	63,79	3.954	36,21	21.491	52,16	19.711	47,84
	PKWTT	5.703	83,15	1.156	16,85	26.738	84	5.094	16,00

	Perjanjian lisan	502	7,73	5.992	92,27	1.954	5,32	34.791	94,68
Status Pekerjaan	Informal	90	1,72	5.148	98,28	605	1,6	37.113	98,4
	Formal	14.507	48,23	15.571	51,77	54.523	41,77	76.006	58,23
Tingkat Pendidikan	Rendah	1.964	15,56	10.661	84,44	8.046	11,35	62.816	88,65
	Sedang	6.831	47,09	7.674	52,91	21.311	37,39	35.688	62,61
	Tinggi	5.802	70,88	2.384	29,12	25.771	63,81	14.615	36,19
Kelompok umur	15-24	1.868	33,19	3.760	66,81	4.974	20,10	19.771	79,9
	25-34	4.034	45,66	4.801	54,34	13.383	31,12	29.621	68,88
	35-44	4.025	43,15	5.303	56,85	17.311	36,56	30.040	63,44
	45-54	3.468	42,53	4.687	57,47	14.348	38,46	22.957	61,54
	55-64	1.202	35,67	2.168	64,33	5.112	32,27	10.730	67,73

Sumber: Sakernas Agustus 2021(data diolah)

Pada gambar 1. terlihat bahwa mayoritas pekerja yang berada di Kota Metropolitan dan kota non-metropolitan tidak ikut jamsos. Namun, partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan lebih tinggi di Kota Metropolitan (41,33%) jika dibandingkan dengan kota non-metropolitan (32,77%).

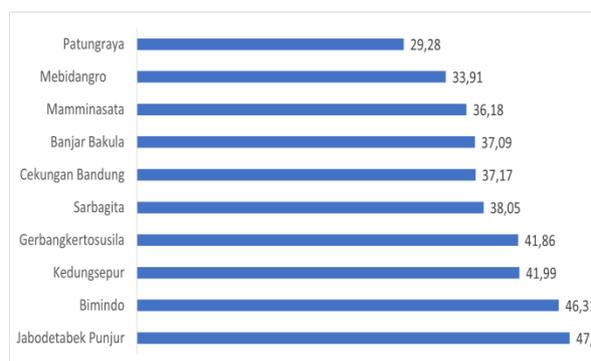


Gambar 1. Partisipasi Jaminan Sosial

Sumber: Sakernas Agustus 2021(data diolah)

Pada gambar 2. terlihat bahwa 10 kawasan metropolitan berdasarkan pembagian PUPR bahwa partisipasi jaminan sosial yang tertinggi berada di Kawasan Jabodetabek Punjur yakni sebesar 47,5 persen. Kawasan ini terdiri dari Daerah

Khusus Ibukota Jakarta yang karakteristiknya daerah yang maju dan cenderung memiliki akses yang tinggi.



Gambar 2. Partisipasi Jaminan Sosial Berdasarkan Kawasan Metropolitan

Sumber: Sakernas Agustus 2021(data diolah)

Dengan adanya akses yang tinggi yang didukung adanya kondisi daerah yang maju seyogyanya akan memiliki literasi akan manfaat jaminan sosial sehingga akan berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuan seseorang untuk berpartisipasi pada jamsos yakni untuk memitigasi resiko-resiko kerja dan memberi rasa kenyamanan dalam bekerja

**Tabel 4. Partisipasi Jaminan sosial berdasarkan Jenis Kota dan Status Kontrak Kerja**

Karakteristik	Tidak Ikut jamsos		Ikut jamsos		
	N	%	N	%	
Jenis Kota	Kota Metropolitan	20.719	58,67	14.597	41,33
	Kota Non Metropolitan	113.119	67,23	55.128	32,77
Status kontrak kerja	Tidak ada	63.140	90,83	6.371	9,17
	PKWT	23.665	45,4	28.457	54,6
	PKWTT	6.250	16,15	32.441	83,85
	Perjanjian lisan	40.783	94,32	2.456	5,68

Sumber: Sakernas Agustus 2021(data diolah)

Berdasarkan Tabel 4. Terlihat bahwa berdasarkan jenis kota bahwa Kota metropolitan lebih banyak berpartisipasi pada jaminan sosial jika dibandingkan dengan kota non-metropolitan. Namun memang, baik di kota metropolitan dan kota non-metropolitan masih berada dibawah 50 persen. Harapannya angka ini lebih tinggi lagi agar para pekerja terlindungi dan terhindar dari resiko ketidakpastian yang akan mengurangi pendapatannya dimasa yang akan datang. Selanjutnya, jika dilihat dari status kontrak pekerja bahwa pekerja yang memiliki status PKWTT lebih banyak berpartisipasi pada jaminan sosial yakni mencapai 83,85 persen. Selanjutnya pekerja yang memiliki status PKWT memiliki partisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 54 persen. Hal ini terlihat bahwa semakin pekerja tersebut memiliki kontrak kerja yang jelas dan kontrak jangka panjang, maka pekerja itu cenderung akan berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan.

## PEMBAHASAN

### Kota Metropolitan dan Kota Non-Metropolitan

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel jenis kota bahwa hasil analisis memperlihatkan hubungan yang positif yang signifikan terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika dilihat dari nilai *odds*

*ratio* pada variabel status perkotaan diperoleh 1,411 artinya peluang responden yang berada di wilayah kota metropolitan meningkat sebesar 1,411 kali dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan dengan pekerja yang berada di wilayah kota non-metropolitan.

Penelitian yang dilakukan oleh Baloul dan Dahlui (2014) mengemukakan bahwa di akses layanan jaminan sosial di perkotaan lebih baik dibandingkan dipedesaan. Hal ini didukung dengan data bahwa penduduk di perkotaan 26 persen lebih tinggi mengikuti jaminan sosial jika dibandingkan dengan penduduk di pedesaan. Tidak hanya itu saja, menurut Mudgal et al. (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan sehingga penduduk di pedesaan cenderung sulit mendapatkan jaminan akibat akses yang kurang. Penelitian ini selaras dengan Kirigia et al (2005) yakni penduduk yang tinggal di Pemukiman informal perkotaan cenderung lebih rendah kepesertaannya.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee et al., (2010) bahwa penduduk kota-kota kecil dan area pedesaan lebih banyak membeli asuransi dibandingkan penduduk kota metropolitan disebabkan penduduk kota-kota kecil dan area pedesaan tidak mendapatkan manfaat

perlindungan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ternyata partisipasi pekerja yang berada di Kota Metropolitan lebih tinggi dibandingkan pekerja di kota non-metropolitan. Hasil olah data menunjukkan ada sebanyak 41,33 persen yang berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan di kota metropolitan dan 32,77 persen di kota non-metropolitan. Hal ini dapat terjadi akibat akses informasi yang besar mengenai pendaftaran, pembayaran, penggunaan dan manfaat dari program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga, lebih banyak kantor BPJS Ketenagakerjaan di kota metropolitan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau BPJS Ketenagakerjaan.

### **Status Kontrak Kerja**

Status kontrak kerja atau sering disebut perjanjian kerja sangat penting bagi pekerja. Adapun perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Individu yang memiliki kontrak kerja cenderung akan terlibat dalam jaminan sosial (Cheng, 2014). Hasil temuan bahwa Variabel status Kontrak Kerja menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika dilihat dari nilai odds ratio pada pekerja yang berstatus PKWT diperoleh 6,717 artinya peluang pekerja yang berstatus PKWT meningkatkan sebesar 6,717 kali menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki status kontrak kerja.

Selanjutnya pekerja yang berstatus PKWTT berpeluang untuk menjadi menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 22,888 kali dibandingkan pekerja yang tidak memiliki status kontrak kerja. Tidak hanya itu saja, pekerja yang memiliki perjanjian lisan berpeluang untuk menjadi

peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 0,610 kali dibandingkan pekerja yang tidak memiliki status kontrak kerja. Dalam hal ini didapatkan bahwa dengan mengacu pada kepemilikan status kontrak atau perjanjian kerja, pekerja yang memiliki status pekerjaan yang tetap dan jangka panjang maka semakin besar peluang pekerja tersebut untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penelitian oleh Gao et al., (2012) menemukan hal yang serupa bahwa kontrak kerja bagi pekerja bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi hak-hak dasar mereka. pekerja yang memiliki kontrak jangka panjang dapat meningkatkan kemungkinan memiliki asuransi sosial yakni 4,96 kali peluang untuk asuransi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kontrak. Tidak hanya itu saja, penelitian yang dilakukan oleh Cheng (2014) bahwa pekerja yang memiliki kontrak kerja lebih mungkin berpartisipasi dalam asuransi sosial daripada yang tanpa kontrak.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan kesimpulan yang sama bahwa pekerja yang memiliki kontrak kerja akan lebih mudah mendapatkan asuransi atau jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Pekerja yang memiliki kontrak kerja akan memiliki peluang untuk mendapatkan jaminan sosial lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki kontrak kerja sebab kontrak kerja bertujuan untuk melindungi pekerja dimana hal ini dapat tercapai salah satunya dengan memberikan jaminan sosial. Hal ini menggambarkan pentingnya memiliki kontrak kerja dalam rangka melindungi pekerja maupun memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menghadapi risiko kerja.

## Faktor demografi

Faktor demografi yang merupakan variabel bebas kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun faktor demografi terdiri dari jenis kelamin, status perkawinan, umur, umur kuadrat, Tingkat pendidikan terakhir, ukuran rumah tangga dan status pekerjaan. Berdasarkan tabel 2. bahwa variabel jenis kelamin, status perkawinan, umur, umur kuadrat, Tingkat pendidikan terakhir dan status pekerjaan berpengaruh positif yang signifikan sedangkan Variabel ukuran rumah tangga berpengaruh negatif signifikan memengaruhi partisipasi pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan tabel 2. bahwa berdasarkan jenis kelamin, nilai *odds ratio* sebesar 1,530 menunjukkan bahwa pekerja laki-laki memiliki kecenderungan 1,530 kali untuk berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan pekerja perempuan dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Hal ini serupa dengan studi Holmes & Scott (2016) bahwa partisipasi pekerja laki-laki secara umum lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini didukung dengan pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan perempuan memiliki banyak faktor yang menghambat dimana umumnya memiliki tekanan tanggung jawab rumah tangga yang tinggi serta pendidikan yang lebih terbatas sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mendaftar dan berpartisipasi. Selanjutnya status perkawinan yakni pekerja yang sudah kawin memiliki kecenderungan 1,295 kali untuk berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan pekerja yang belum menikah. Hal ini serupa dengan studi Zong et al., (2017) bahwa pekerja yang telah menikah memiliki tanggung jawab terhadap

keluarga, mereka akan sadar mengenai risiko dan kecelakaan kerja yang akan berdampak terhadap faktor sosial dan ekonomi keluarga, sehingga partisipasi terhadap jaminan sosial lebih tinggi dibanding pekerja yang belum pernah menikah.

Variabel selanjutnya yakni umur bahwa seiring dengan semakin meningkatnya umur pekerja maka akan meningkatkan kecenderungan untuk berpartisipasi pada jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia pekerja maka akan meningkatkan peluang berpartisipasi. Berdasarkan variabel tingkat pendidikan terakhir menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki pendidikan sedang memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi sebesar 1,948 kali dibandingkan pekerja dengan pendidikan rendah. Kemudian pekerja dengan pendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi sebesar 2,445 dibandingkan pekerja dengan pendidikan rendah. Hal ini terlihat bahwa Semakin tinggi level pendidikan maka cenderung meningkat juga partisipasinya pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Studi ini selaras dengan studi Kirigia et al., (2005) bahwa Pendidikan memiliki hubungan yang Positif dan signifikan yakni pekerja dengan pendidikan menengah kemungkinan memiliki jaminan sosial 2 kali dibandingkan pendidikan rendah. Hal ini dikaitkan dengan pendapatan yang lebih besar dan dibarengi dengan pendidikan dan pengetahuan tentang manfaat asuransi agar terhindar dari resiko di masa depan.

Berdasarkan ukuran rumah tangga bahwa memiliki kecenderungan 0,945 kali menurunkan partisipasi pekerja pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya variabel status pekerjaan, pekerja yang bekerja di sektor formal memiliki kecenderungan 8,812 kali untuk berpartisipasi pada jaminan sosial

jika dibandingkan pekerja yang bekerja di sektor informal.

### **Tantangan Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial**

Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah isu yang penting diperhatikan namun memang memiliki banyak tantangan yang dihadapi. Hal ini didukung dengan besarnya skala informal dimana memiliki karakteristik yakni pendapatan yang rendah, produktivitas kerja yang rendah. Faktor-faktor ini yang kemudian membuat sulitnya mengikuti skema jaminan sosial. Banyak sekali pekerja di Indonesia jaminan akan ketenagakerjaan (*employment security*) berupa jaminan pensiun termasuk didalam bagiannya yakni tunjangan atas risiko yang terjadi seperti penyakit, kecelakaan kerja bahkan yang fatal yakni menyebabkan kematian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angelini & Hirose (2004) bahwa terdapat berbagai faktor penghambat perluasan cakupan jamsos terutama bagi pekerja sektor informal antara lain: (1) Pendapatan yang rendah dan tidak tetap (2) Kebutuhan dan sumber daya tidak sejalan dengan jenis dan bentuk manfaat yang diterima (3) Rendahnya kesadaran atas konsep maupun manfaat jaminan sosial sendiri dibarengi dengan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga negara yang mengelola jaminan sosial (4) keberhasilan perluasan jaminan sosial sangat tergantung pada peningkatan kapasitas administratif yang berkelanjutan (Angelini & Hirose, 2004)

Terdapat permasalahan terkait dengan cakupan kepesertaan di sektor informal (BPU) yaitu informasi terkait program yang ditawarkan belum banyak diketahui oleh pekerja BPU. Tidak hanya itu saja, adanya stigma terkait pelayanan dan pelaksanaan di lapangan yang rumit prosedural dan tidak

ramah (Badikenita, 2017). Sejalan dengan itu, menurut penelitian Madya & Nurwahyuni (2019) bahwa banyaknya pekerja yang tidak mengetahui manfaat jamsos, terutama bagi pegawai sektor informal dimana mayoritas berada di kota non-metropolitan. Tidak hanya itu saja, kesadaran dan literasi akan pentingnya jaminan sosial itu juga sangat rendah. Selain itu ternyata bukan hanya literasi akan manfaat dari sisi pekerja saja yang rendah tapi dari sisi pemberi kerja juga dimana tidak mengetahui adanya program dan merasa tidak penting akan program jaminan sosial (Manurung, 2018; Noviansyah & Ibrahim, 2019; Djakaria, 2018). Hal ini didukung penelitian Agyei-Baffour (2022) yang mengemukakan bahwa kebanyakan pekerja tidak mengetahui implementasi skema yang diusulkan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi publik mengenai skema yang diusulkan.

Sejalan dengan hal tersebut, fakta dilapangan ternyata para pekerja sektor informal seperti pekerja di kawasan nelayan, pasar tradisional, petani dsb lebih mengenal BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah merasakan langsung manfaatnya (Badikenita, 2017). Tidak hanya itu saja, dibarengi dengan adanya persepsi yang masih salah dari sisi pemberi kerja atau pengusaha dimana pemberi kerja menganggap jikalau sudah mendaftar di BPJS Kesehatan maka pekerjaanya tidak perlu mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan lagi (Manurung, 2018)

Tantangan selanjutnya yakni sulitnya menagih iuran bagi pekerja yang berada pada kelompok pekerja informal dan berada pada wilayah kota non-metropolitan yang memiliki wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, pendapatan yang yang tidak tetap dan adanya ketidakpercayaan terhadap cara pengelolaan membuat para pekerja tidak mau untuk

berkontribusi pada jaminan sosial (ILO, 2001)

Sektor informal memiliki tantangan yang komprehensif, namun sektor formal itu sendiri juga memiliki permasalahan terkait pemenuhan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal sebenarnya bagi sektor formal, mengikuti program jaminan sosial diwajibkan. Namun, praktik dilapangan berbeda dimana masih menuai banyak permasalahan yakni kurangnya kesadaran dari pemberi kerja dalam melaksanakan program yang ditawarkan. Hal ini dibarengi dengan adanya motif penghematan pengeluaran dari perusahaan. Tidak hanya itu saja, dari sisi regulasi bahwa adanya kurang kuatnya pengawasan dan kurang tegasnya hukum pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan (Buhoy, 2013).

### **Strategi Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial**

Peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki permasalahan yang kompleks. Hal ini terlihat adanya tingginya informalitas, dimana berada pada wilayah kota non-metropolitan yang memiliki akses yang minim dan sulit untuk dijangkau (Purba et al., 2020). Namun, untuk mendukung pemerintah memperluas jangkauan jaminan sosial secara universal, berbagai peraturan dan kebijakan sudah dilakukan. Namun memang, perlu dipetakan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama bagi pekerja yang berada di sektor informal dan pekerja di kota non-metropolitan yang partisipasi jaminan sosial yang masih rendah.

Strategi yang dilakukan bagi pekerja di Kota non-Metropolitan dimana terdapat pekerja informal yakni perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh. Hal ini

dikarenakan masih banyak yang minimnya literasi akan manfaat jaminan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan menggiatkan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat dan menggunakan metode yang mudah diterima masyarakat (Triyono et al., 2019). Tidak hanya itu saja, diperlukan pembentukan desa sadar BPJS Ketenagakerjaan yang lebih banyak lagi dimana dengan adanya desa sadar ini diharapkan sebagai wadah mengedukasi masyarakat dan memunculkan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi pada jaminan sosial (Sari & Adi, 2020). Hal ini terlihat bahwa adanya desa sadar ini cukup berhasil untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial, seperti halnya di wilayah Kabupaten Bantul dimana juga menjadi percontohan Nasional (Triyono et al., 2019).

Kota Metropolitan dimana memiliki akses yang tinggi, namun memang perlu strategi. Hal ini terlihat bahwa walaupun pekerja berada di Kota Metropolitan, masih ada yang belum berpartisipasi pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal ini bahwa diperlukan adanya pembenahan kontrak dan juga adanya sosialisasi bagi perusahaan terkait pentingnya jaminan sosial. Sosialisasi serta edukasi juga tidak semena-mena hanya dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan namun juga dapat melibatkan Pemda setempat. Hal ini sebagai salah satu solusi penting untuk mendorong pengusaha mendaftarkan pekerjanya (Noviansyah & Ibrahim, 2019). Selanjutnya, diperlukan sosialisasi yang masif terkait hukuman/sanksi jika tidak mendaftarkan buruh/karyawannya sebagai peserta jaminan sosial. Tidak hanya itu, diperlukan adanya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pemberi kerja yang melanggar. Karena memang, selama ini masih longgarnya pengawasan, hal ini menjadi celah bagi para pengusaha untuk

melaksanakan program dari BPJS Ketenagakerjaan (Buhoy, 2013).

## KESIMPULAN

Peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini melihat bahwa faktor jenis kota dan status kontrak kerja menjadi faktor yang dilihat untuk mengetahui cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Variabel jenis kota berpengaruh positif yang signifikan. Hal ini terlihat bahwa semakin peserta tersebut berada di wilayah Kota Metropolitan, ternyata memiliki peluang untuk berpartisipasi pada jaminan sosial. Kota metropolitan yang memiliki akses yang tinggi dibandingkan dengan Kota non-metropolitan menjadikan Kota Metropolitan ini lebih memiliki literasi yang lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk berpartisipasi juga akan lebih tinggi.

Berdasarkan kajian ini dan analisis data memberikan bukti bahwa jaminan sosial sangat penting dalam memberi kenyamanan dalam bekerja dan menghindari resiko-resiko ketidakpastian dimasa depan yang akan berdampak pada pendapatan. Penelitian ini menemukan bahwa baik pada kota metropolitan dan kota non-metropolitan, cakupan jaminan sosial masih berada di bawah 50 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang masif agar pekerja mengetahui pentingnya manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya itu perlu adanya sosialisasi hingga wilayah yang terpencil dengan menggandeng komunitas, aparat desa, paguyuban dll untuk membantu dalam proses mengedukasi kepada pekerja.

Selain itu, faktor Status kontrak atau perjanjian kerja berpengaruh positif yang signifikan dalam partisipasi jaminan sosial. Pekerja yang memiliki status PKWTT atau

sering dikenal dengan pegawai tetap cenderung memiliki peluang untuk berpartisipasi jika dibandingkan yang tidak memiliki kontrak kerja. Kontrak kerja penting bagi para pekerja karena bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, perlu mendorong sebanyak mungkin kontrak kerja. Selain itu, Menerapkan kontrak dan pembenahan kontrak bagi pekerja, bagi karyawan perlu tertib dalam memberikan kontrak yang tertulis. Selanjutnya, perlu melakukan sosialisasi dan mengedukasi *employer* terkait skema dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan agar mendorong *employee* mengikuti program yang ditawarkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, diperlukan pemberian sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pegawainya dalam program jaminan sosial dan adanya pengawasan yang ketat oleh pengawas ketenagakerjaan, mengingat masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan *employee*. Dalam mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan juga komitmen pemerintah yang kuat (*political will*) dan diperlukan koordinasi baik antar lembaga mulai dari level pusat hingga daerah. Tidak hanya itu saja, diperlukan kesadaran dan perhatian akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Magister Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia yang telah mendukung data dan analisis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung dalam penyelesaian penulisan artikel ini. Atas kerjasamanya sehingga analisis data yang dilakukan berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 558-580.
- Adzawla, W., Baanni, S. A., & Wontumi, R. F. (2015). Factors influencing informal sector workers' contribution to pension scheme in the Tamale Metropolis of Ghana. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(2), 37-45.
- Agyei-Baffour, P., Jimmy, A. I., Twum, P., Larbie, D., Boateng, K. A., Duah, I. K., ... & Conteh, H. M. (2022). Socio-demographic predictors of willingness to pay for premium of national health insurance: a cross-sectional survey of six districts in Sierra Leone. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(8), 1451-1458.
- Angelini, John and Kenichi Hirose. 2004. "Extension of Social Security Coverage for the Informal Economy in Indonesia: Surveys in the Urban and Rural Informal Economy". Kertas Kerja ILO No. 11. Desember 2004 (Metro Manila).
- Badikenita, R. S. (2017). Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, 2(1), 1-129.
- Baloul, I., & Dahlui, M. (2014). Determinants of health insurance enrolment in Sudan: evidence from Health Utilisation and Expenditure Household Survey 2009. *BMC Health Services Research*, 14(2), 1-1.
- Ben Braham, M., & Marouani, M. A. (2019). Pension systems contribution determinants: A cross sectional analysis on Tunisia. *Middle East Development Journal*, 11(1), 30-48.
- Buhoy, R. S. (2013). Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) di Kabupaten Murung Raya). *Arena Hukum*, 6(3), 308-335.
- Chen, M. (2008). Informality and social protection: Theories and realities.
- Cheng, Z., Nielsen, I., & Smyth, R. (2014). Access to social insurance in urban China: A comparative study of rural-urban and urban-urban migrants in Beijing. *Habitat International*, 41, 243-252.
- Dartanto, T., Rezki, J. F., Pramono, W., Siregar, C. H., Bintara, U., & Bintara, H. (2016). Participation of informal sector workers in Indonesia's national health insurance system. *Journal of Southeast Asian Economies*, 317-342.
- Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 15-28.
- DJPR. (2006). Metropolitan di Indonesia Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang. In *Direktorat Jenderal Penataan Ruang*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Gao, Q., Yang, S., & Li, S. (2012). Labor contracts and social insurance participation among migrant workers in China. *China Economic Review*, 23(4), 1195-1205.
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression*. Canada: Jhon Wiley & Sons, Inc
- Idham, H. (2019). *Postulat dan konstruksi paradigma politik hukum pendaftaran tanah, sistematik lengkap guna mewujudkan negara berkesejahteraan*. Bandung: Alumni.
- ILO. (2001). *Social Security : A New Concensus*.
- Kirigia, J. M., Sambo, L. G., Nganda, B., Mwabu, G. M., Chatora, R., & Mwase, T. (2005). Determinants of health insurance ownership among South African women. *BMC health services research*, 5(1), 1-10.

- Kongtip, P., Nankongnab, N., Chaikittiporn, C., Laohaudomchok, W., Woskie, S., & Slatin, C. (2015). Informal workers in Thailand: occupational health and social security disparities. *New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy*, 25(2), 189-211.
- Lee, S. J., Kwon, S. I., & Chung, S. Y. (2010). Determinants of household demand for insurance: The case of Korea. *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 35(1), S82-S91.
- Lund, F. (2012). Work-related social protection for informal workers. *International Social Security Review*, 65(4), 9-30.
- Madya, S. D. O., & Nurwahyuni, A. (2019). Determinan Sosial Ekonomi Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia: Analisis Data SUSENAS 2017. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 3(2).
- Manurung, D. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Tarakan. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296571.
- Montgomery, Stren, Cohen, & Reed. (2003). *Cities Transformed Demographic Change and Its Implication in the Developing World*. The National Academies Press.
- Mudgal, J., Sarkar, S., & Sharma, T. (2005). Health insurance in rural India. *Economic and Political Weekly*, 4640-4646.
- Noeraini, A. A. (2015). Ekonomi Informal di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1).
- Noviansyah, K. A., & Ibrahim, D. A. (2019). pelaksanaan prinsip kepesertaan bersifat wajib pada sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. *sOLUSI*, 17(3), 203-222.
- Purba, Y. A., Aini, Y. N., Asiati, D., & Ngadi, N. (2020). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2).
- Purnama, A. (2015). Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers. *Jurnal PKS Vol*, 14(2), 149-162.
- Rizal, J. (2020). Menelaah Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Pemerintahan Megapolitan Jabodetabek-Punjur. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 69-90.
- Sanitya, L. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(2), 205-228.
- Sari, M., & Adi, A. S. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Membentuk Kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal Di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(2), 121-137
- Sayekti, N. W., & Sudarwati, Y. (2010). Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 1-24.
- Soewartoyo, S., & Triyono, T. (2013). Kendala kepesertaan program jaminan sosial terhadap pekerja di sektor informal: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 37180.
- Triyono, T., Zaelany, A.A., Alihar, F., Ngadi, N., Ocktaviana, S., Pradipta, L., Barid, V.B., Muslim, F., Aruan, N.L., Kurniawan, F.E., Aini, N.A., Meilianna, R., & Purba, Y.A. (2019). Perluasan Akses dan Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Mendukung Produktivitas Penduduk. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- World Bank. (2020). Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision.
- Zulfa, A. E., & Dwimawanti, I. H. (2018). Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 519-532.